

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis diskresi kebijakan fiskal pada rencana anggaran serta realisasi pemerintah pusat, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil uji *chi square* pada pos penerimaan pemerintah pusat periode 1990-1998 tidak terjadi diskresi antara realisasi dan rencana anggaran dengan nilai χ^2 sebesar 0,385 dan nilai t_{tabel} (0.05; 1) sebesar 3,84 dapat dikatakan nilai t_{hitung} (0,385) < t_{tabel} (3,84) dengan taraf signifikansi $0,535 > 0,05$.
2. Berdasarkan hasil uji *chi square* pada pos penerimaan pemerintah pusat periode 1999-2013 terjadi diskresi yang tinggi antara realisasi dan rencana anggaran dengan nilai χ^2 sebesar 15,384 dan nilai t_{tabel} (0.05; 4) sebesar 3,84 dapat dikatakan nilai t_{hitung} (15,384) > t_{tabel} (9,49) dengan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$.
3. Berdasarkan hasil uji *chi square* pada pos belanja pemerintah pusat periode 1990-1998 tidak terjadi diskresi antara realisasi dan rencana anggaran dengan nilai χ^2 sebesar 0,632 dan nilai t_{tabel} (0.05; 1) sebesar 3,84 dapat dikatakan nilai t_{hitung} (0,632) < t_{tabel} (3,84) dengan taraf signifikansi $0,959 > 0,05$.

4. Berdasarkan hasil uji *chi square* pada pos belanja pemerintah pusat periode 1999-2013 terjadi diskresi yang tinggi antara realisasi dan rencana anggaran dengan nilai χ^2 sebesar 12,195 dan nilai $t_{\text{tabel}} (0,05;4)$ sebesar 3,84 dapat dikatakan nilai $t_{\text{hitung}} (12,195) > t_{\text{tabel}} (9,49)$ dengan taraf signifikansi $0,016 < 0,05$.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka beberapa implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, antara lain :

1. Dari hasil penelitian analisis rencana anggaran serta realisasi penerimaan dan belanja pada pemerintah pusat adalah masing-masing pos memiliki nilai rata-rata perbedaan rencana anggaran dan realisasi yang cukup besar sehingga dapat menyebabkan ruang diskresi semakin besar, masing-masing pos sangat rentan sekali mengalami diskresi kebijakan fiskal, yang dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Jika hal tersebut terjadi maka ruang untuk pencapaian tujuan nasional seperti pertumbuhan ekonomi, alokasi dana kegiatan pemerintah, belanja modal dan lain-lain semakin sulit karena ketidaktepatan perkiraan rencana anggaran dengan realisasinya.
2. Pada periode 1990-1998 pemerintah pusat tidak terjadi diskresi kebijakan fiskal pada pos penerimaan ataupun belanja, hal ini dikarenakan situasi perekonomian dan politik nasional yang stabil berjalan sesuai rencana pemerintah tanpa dampak buruk seperti inflasi

yang tinggi, kurs rupiah terhadap dollar stabil, harga jual barang bahan pokok di pasar nasional stabil sesuai target pemerintah, perdagangan internasional lancar dan bencana alam dalam skala besar yang dapat merugikan suatu perekonomian daerah tidak terjadi sehingga alokasi dana anggaran pemerintah tepat sasaran.

3. Pada periode 1999-2013 pemerintah pusat terjadi diskresi kebijakan fiskal pada masing-masing pos penerimaan dan belanja, kondisi perekonomian nasional memprihatinkan disebabkan krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998, inflasi tinggi disebabkan kurs Rupiah melemah drastis terhadap Dollar Amerika. Inflasi berdampak buruk pada harga barang di pasar, harga barang naik, kriminalitas meningkat, perusahaan dan bank nasional banyak yang *collapse*, pemerintah meminjam besar-besaran kepada IMF guna memenuhi hajat serta memperbaiki perekonomian nasional dan menyebabkan hutang luar negeri membengkak dengan bunga yang cukup besar pula. Akhirnya pemerintah meningkatkan belanja pada sektor subsidi dan belanja modal selain itu menggenjot penerimaan dari sektor pajak.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan serta implikasi di atas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yakni:

1. Untuk menjaga agar penerimaan dan belanja pemerintah tetap stabil dan tidak terjadi diskresi fiskal yang tinggi maka sebaiknya pemerintah dan segenap Menteri Keuangan mengestimasi dana

anggaran di luar anggaran dan mengantisipasi masalah-masalah yang akan terjadi di tahun yang akan datang (faktor eksternal maupun internal) sehingga anggaran kegiatan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya dapat terlaksana dengan maksimal tanpa merubah alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Pemerintah sebaiknya lebih konsisten serta berhati-hati dalam mengambil keputusan penetapan anggaran, menghindari terjadinya perubahan kebijakan dan muncul kebijakan baru yang sebelumnya tidak pernah direncanakan.
3. Pemerintah sebaiknya menekankan kepada para legislator pemangku kepentingan, pejabat, agar berusaha menghindari memberi “hak kebebasan diskresi” ini dalam mengambil keputusan, jangan diberi keleluasaan dalam mengambil keputusan jika memang hal tersebut adalah masalah yang sulit diatasi dan dalam situasi kondisi benar-benar terdesak tidak ada pemecahan masalah lain kecuali pengambilan kebijakan diskresi tersebut.